

# PERBANASNews

No. 150 Tahun XL April-September 2023

**Strategi Bank Hadapi  
"Debitur Sontoloyo"**

**Bank-Bank Panen Cuan  
di Tengah Tahun 2023**



**RUA PERBANAS 2023:  
PERBANAS DORONG  
PENGUATAN IMPLEMENTASI ESG**

## PERBANASNews

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional  
(PERBANAS)

**PELINDUNG**

Badan Pengurus Perbanas

**REDAKSI**

Anika Faisal  
Aviliani

**REDAKTUR PELAKSANA**

Eka Sri Dana Afriza  
Andry Asmoro  
Enrico Tanuwidjaja

**SIRKULASI**

Wara Sri Indriani

**KONSULTAN**

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

**TARIF IKLAN****Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

**Isi**

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

PerbanasNews menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

Griya Perbanas Lantai 1  
Jalan Perbanas, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940  
Telepon: (021) 5255731, 5223038  
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: [www.perbanas.org](http://www.perbanas.org)  
e-mail: [sekretariat@perbanas.org](mailto:sekretariat@perbanas.org)

IZIN PENERBITAN KHUSUS  
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN  
PPG/STT/1993,  
2 September 1993  
ISSN: 0854-4174

# P

**PERBANASNews** edisi 150 (April-September 2023) ini mengangkat laporan utama dari kegiatan Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS, yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Juli 2023. Di forum tertinggi asosiasi industri perbankan nasional ini, selain mendengarkan laporan kinerja pengurus tahun 2022 dan pemaparan agenda kerja tahun 2023, juga digelar diskusi dengan tema aktual di industri perbankan nasional.

Tema utama diskusi yang menjadi isu besar dalam RUA PERBANAS adalah terkait perubahan iklim yang menjadi isu global. Implementasi *ESG* (*environmental, social, and governance*) di industri perbankan dan keuangan menjadi konsen pemerintah, regulator, dan praktisi atau para pelaku bisnis untuk bersama-sama menghadapi perubahan iklim dan memastikan bisnis yang dilakukan selalu berorientasi pada *sustainability*.

Isu lain yang diangkat sebagai laporan khusus di antara tema yang ada, yaitu diambil dari acara CFO Forum PERBANAS bertajuk “**Navigasi Tantangan Perbankan**” yang digelar pada Rabu, 27 September 2023.

Pentingnya navigasi untuk menghadapi tantangan perlambatan ekonomi yang kembali mengemuka pasca-melemahnya ekonomi Tiongkok. *Tiongkok effect* menjadi momok yang hampir pasti akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pro kontra kebijakan *spin off* unit usaha syariah (UUS) bank umum juga menjadi salah satu laporan khusus di edisi kali ini. Upaya regulator untuk mendukung pertumbuhan dan *market share* perbankan syariah nasional sepertinya membutuhkan *effort* lebih dengan melakukan pendekatan ke industri. Memperbesar pasar perbankan syariah di Indonesia adalah cita-cita bersama, sehingga semua *stakeholder* harus diikutsertakan ketika membuat kebijakan terkait masalah ini.

**PERBANASNews** edisi kali ini juga menghadirkan Ketua Bidang Pengembangan Kajian Hukum dan ESG Perbanas, Fransiska Oei, dalam rubrik “Interview”. Merebaknya kasus debitur nakal yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, serta maraknya kasus pinjaman *online* (pinjol) bermasalah, menjadi tema *interview* dengan Direktur Kepatuhan Bank CIMB Niaga itu.

Pada **PERBANASNews** edisi kali ini juga menampilkan artikel lepas di rubrik Bankers Insight yang ditulis oleh Moh. Shofa Akbar, Oto Risk Officer Bank Syariah Indonesia (BSI). Semoga artikel ini menjadi pendorong bankir-bankir lain untuk mengirimkan tulisannya ke Redaksi **PERBANASNews**.

Mulai edisi yang akan datang, jadwal penerbitan **PERBANASNews** akan berubah, yang selama ini empat kali dalam setahun menjadi dua kali dalam setahun, yakni di pertengahan tahun dan di akhir tahun, dengan tetap menjaga kualitas informasi atau berita yang bermanfaat untuk industri perbankan.

Selamat membaca.



**PERBANAS UTAMA**  
**Perbankan Indonesia Paling Kuat & Stabil di Dunia | 6**

Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menjadi pelajaran berharga bagi industri perbankan nasional. Belajar dari pengalaman krisis, perbankan Indonesia kini menjadi yang terkuat dan paling stabil di dunia.

**LAPORAN KHUSUS**  
**Tak Kunjung Berlari Didorong Kebijakan Sapih UUS | 8**

Peraturan OJK terkait dengan *spin off* UUS dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah belum mampu “berlari” kencang sesuai harapan.



**LAPORAN KHUSUS**  
**Navigasi Hadapi Tiongkok Effect di Tahun Naga Kayu | 10**

Perekonomian nasional 2024 akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok. Perbankan perlu waspada. Apalagi, per Maret 2024 restrukturisasi untuk UMKM akan berakhir dan berpotensi mendongkrak kredit bermasalah.

**PERBANAS UTAMA**  
**RUA PERBANAS 2023:  
 PERBANAS Dorong Penguatan Implementasi ESG | 3**

Perbankan nasional diharapkan bisa menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia yang berperan aktif dalam mereduksi emisi karbon. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian strategi pembiayaan dan portofolio kredit yang mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia.

**INTERVIEW**

Fransiska Oei, *Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs & Legal di PT Bank CIMB Niaga Tbk*

**Strategi Bank Hadapi Debitur Sontoloyo | 12**

Apa yang mesti dilakukan bank ketika menghadapi “debitur sontoloyo” alias debitur yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya? Apa pula yang mesti disiapkan bank untuk menerapkan ESG?



**STATISTIK**

**Bank-Bank Panen Cuan di Tengah Tahun 2023 | 14**

**REGULATOR**

**Untung Rugi Premi Program Restrukturisasi | 16**

**Ini Dia Dua ADK OJK Pilihan Presiden dan DPR | 17**

**Poin Tentang Peraturan OJK Tentang Cuci Uang | 18**

**ASOSIASI**

RUA IBI Tahun 2023

**Warning IBI untuk Bankir Nasional | 19**

**BANKERS INSIGHT**

**Pembiayaan Fleet Operasional Untuk Kendaraan Ramah Lingkungan | 20**

Pengembangan produk pembiayaan *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan merupakan solusi dalam implementasi ESG dan mendukung aktivitas hijau di Indonesia. Harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek risiko dan mitigasinya.

**Pilih Bank Digital Atau Bank Konven dengan Layanan Digital? | 22**

**ACTIVITY**

**PERBANAS & BI Sumbar Bantu Korban Bencana di Padang | 24**

**SUPLEMEN**

**Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih**



## RUA PERBANAS 2023: PERBANAS Dorong Penguatan Implementasi ESG

Foto: Istimewa

Perbankan nasional diharapkan bisa menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia yang berperan aktif dalam mereduksi emisi karbon. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan strategi pembiayaan dan portofolio kredit yang mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia.

**P**

ERHIMPUNAN Bank Nasional (PERBANAS) menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) pada Kamis, 20 Juli 2023. Forum tertinggi asosiasi industri perbankan ini adalah ajang tahunan untuk mendengarkan laporan kinerja ketua umum dan jajaran pengurus, sekaligus pemaparan agenda kerja ke depan.

Selain forum pertanggungjawaban pengurus organisasi, RUA menjadi tempat berdiskusi pelaku industri jasa keuangan bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PERBANAS turut menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai *keynote speaker*.

Pada acara RUA sekaligus memperingati ulang tahun ke-71 PERBANAS itu juga digelar diskusi panel dengan

mengundang sejumlah pembicara, di antaranya Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Mari Elka Pangestu; Ketua Badan Pengawas PERBANAS, Muhammad Chatib Basri; dan mantan bankir yang kini menjadi Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), Ridha D.M. Wirakusumah.

Diskusi panel bertajuk "*Sustainable Finance: Indonesia's Economic Transformation towards a Nature-Positive Future*" dipilih PERBANAS untuk lebih memahami dua isu utama yang saat ini sangat relevan bagi industri. Pertama, perspektif makro tentang transformasi ekonomi dan strategi pemerintah dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Kedua, rencana pengembangan dan peran perbankan dalam mendorong terwujudnya keuangan berkelanjutan yang komprehensif.



Dalam sambutannya, Menko Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki enam agenda utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Agenda itu antara lain industrialisasi melalui hilirisasi, dekarbonisasi untuk mempercepat *net zero* sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau, dan menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial.

“Pentingnya dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan dalam menggerakkan sektor riil dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup,” tegas Luhut.

Berbagai negara telah mengambil tindakan serius dalam mengatasi perubahan iklim dan implementasi *ESG* (*environmental, social, and governance*). Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut berkomitmen melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga sebesar 31,9% pada 2030 dan *net zero emissions* (*NZE*) pada 2060.

“Perbankan harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia yang berperan aktif dalam mereduksi emisi karbon, melalui penyalaraan strategi pembiayaan dan portofolio kredit yang mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia (*THI*),” ujar Ketua Umum PERBANAS, Kartika Wirjoatmodjo, dalam kata sambutannya.

Selain itu, PERBANAS mengapresiasi para anggotanya yang telah mendorong perusahaan atau debitur yang bergerak di bidang ekstraksi energi, seperti pertambangan dan perminyakan, pembangkit energi berbahan bakar fosil, dan transmisi energi, untuk melangkah pada inisiatif transisi energi melalui pemberian fasilitas *green financing* maupun *sustainability loan facility*.

PERBANAS berharap, terkait pengembangan ekosistem energi baru terbarukan (*EBT*), dukungan perbankan terhadap transisi energi tidak cukup hanya berhenti di sisi hulu, tapi juga harus ke hilir. Hilirisasi bahan baku, seperti nikel, merupakan kunci strategis dalam pengembangan industri kendaraan listrik yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon.

“Kami berharap bisa lebih berkontribusi untuk menyentuh regulasi ekonomi hijau. Kami juga ingin mengubah visi perbankan ke depannya supaya bisa melakukan *alignment* (penyelaraan) untuk membantu pemerintah dalam melakukan transformasi ini,” ujar Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo.

Selain itu, PERBANAS sebagai wadah perbankan nasional yang menjadi jembatan antara bank BUMN, bank swasta, dan bank asing dengan regulator seperti BI dan OJK, juga berkomitmen untuk memperkuat dan memperbaiki regulasi terkait kebijakan masa *post COVID*, perpajakan, hingga *IT security*. ■



**“Kami berharap bisa lebih berkontribusi untuk menyentuh regulasi ekonomi hijau. Kami juga ingin mengubah visi perbankan ke depannya supaya bisa melakukan *alignment* (penyelaraan) untuk membantu pemerintah dalam melakukan transformasi ini.”**

**Kartika Wirjoatmodjo.**

## Pilot Project Taksonomi Hijau Diimplementasikan di Bank-Bank Besar

OJK telah menindaklanjuti terbitnya Taksonomi Hijau Indonesia dengan melakukan *pilot project* secara bertahap untuk bank-bank besar di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung implementasi *environmental, social, and governance* (ESG) di sektor jasa keuangan, yang telah diatur dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan, sektor keuangan terpantau makin menggalakkan prinsip ESG. Hal itu terlihat dari kian banyaknya produk atau instrumen maupun layanan keuangan guna mendukung transisi hijau, baik di sektor perbankan, IKNB, maupun pasar modal.

"Di pasar modal investor semakin sadar untuk memilih berinvestasi di instrumen hijau dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya indeks ESG di bursa nasional, contohnya indeks Sri Kehati, IDX LQ45 *local brand leader*, dan IDX ESG Leaders," ujar Mahendra.

Selain itu, OJK telah menindaklanjuti terbitnya taksonomi hijau Indonesia pada tahun lalu. OJK melakukan *pilot project* implementasi taksonomi hijau secara bertahap untuk bank-bank besar di Indonesia.

"Dan, *pilot project* tersebut diharapkan dapat mendorong pemahaman industri jasa keuangan terhadap taksonomi hijau serta meningkatkan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan yang tidak hanya untuk membiayai proyek hijau, namun juga untuk mendanai transisi untuk sektor yang hasilkan emisi karbon tinggi menjadi ramah lingkungan," jelasnya.

Ke depan, *pilot project* tersebut akan diperluas dengan melibatkan institusi perbankan lainnya. Saat ini masih dibatasi, hanya beberapa bank sebagai *pilot project*. Eksposur sektor jasa keuangan pembiayaan hijau terus didorong untuk lebih ekspansif.

Seperti diketahui, hingga akhir 2022, Green Bond telah terbit di pasar domestik Rp15,4 triliun. Dalam kerangka "blended finance platform SDG Indonesia one" telah terhimpun komitmen pendanaan dan fasilitas lainnya sebesar Rp3,26 miliar dolar per Maret 2023, yang juga melibatkan partisipasi institusi perbankan.

Berkaitan dengan besaran kredit yang sudah dialokasikan ke pembiayaan hijau secara total yaitu sebesar Rp728,9 triliun. Perinciannya, sebesar Rp541,9 triliun terkait dengan portofolio besar dan Rp186,9 triliun terkait dengan portofolio UMKM.

Sementara itu, secara khusus terkait dengan program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan hijau, untuk portofolio kredit terkait dengan mobil listrik atau EV telah dialokasikan sebesar Rp1,28 triliun, sedangkan, untuk alokasi bagi kegiatan energi terbarukan sebesar Rp28,9 triliun.



# RUA PERBANAS 2023: Perbankan Indonesia Paling Kuat & Stabil di Dunia

**Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menjadi pelajaran berharga bagi industri perbankan nasional. Belajar dari pengalaman krisis, perbankan Indonesia kini menjadi yang terkuat dan paling stabil di dunia.**

Tahun 1998, kawasan Asia, termasuk Indonesia, dilanda krisis. Tak hanya meluluhlantakkan struktur ekonomi nasional, krisis yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru itu juga memberikan pelajaran berharga kepada pelaku industri perbankan nasional. Sebuah pelajaran yang dijadikan pegangan bagi para praktisi, regulator, juga pemerintah. Bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun, menjaga perbankan nasional untuk tetap stabil, tetap *survive*, dan terus bertumbuh adalah hal utama.

Berbagai krisis, bukan hanya krisis 1998, berhasil dilalui dengan baik oleh industri perbankan kita. Bahkan, pandemi COVID-19, yang menghancurkan ekonomi banyak negara, seperti tak berpengaruh terhadap industri perbankan Indonesia. Kini, industri perbankan Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat kuat, malah menjadi salah satu yang stabil dan terkuat di dunia.

"Kalau kita lihat di saat dunia lain terjadi permasalahan perbankan, seperti Amerika Serikat (AS) seperti krisis SVB. Indonesia sudah hampir 25 tahun tidak mengalami krisis perbankan. Ini satu hal yang unik bahwa kita pascakrisis Asia benar-benar memperbaiki tata kelola, *risk management*, dan portofolio *management*," ujar Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS, di Auditorium Bank Mandiri, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.

Menurut Kartika, selain memperbaiki tata kelola, *risk management*, dan portofolio *management*, juga dibarengi dengan penerapan bisnis yang terstruktur dengan berbagai regulasi yang ada. Bahkan,



perbankan Indonesia termasuk yang pertama mengadopsi regulasi Basel III, yang merupakan standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*.

"Termasuk kemarin waktu krisis SVB kita heran kok bisa ada bank di AS sebesar SVB kolaps. Ternyata mereka tidak pakai Basel III. Di AS hanya menggunakan *Domestic Systemically Important Bank*. Di luar itu, SVB tidak pakai Basel III," tambah Kartika, yang biasa disapa Tiko.

Untuk itu, lanjut dia, PERBANAS juga ingin mendorong perbankan di Indonesia bisa mengikuti rancang bangun pertumbuhan ekonomi. Sehingga, perbankan akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi paling utama, karena perbankan merupakan sektor yang stabil dan kuat.

"Ini yang kita masih *missed*. Perbankan kita saat ini belum mengikuti rancang bangun ekonomi Indonesia. Saya juga sering dipanggil Presiden yang berharap pada saat negara melakukan perencanaan ekonomi dan perencanaan pembangunan harusnya perbankan

mengikuti pola itu dan membuat portofolio yang mendukung. Ini kita coba ke depan, rancang bangun transisi ekonomi menuju negara maju,” tegasnya.

Kartika juga melihat tingginya komitmen perbankan nasional dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Perbankan harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia yang berperan aktif dalam mereduksi emisi karbon, melalui penyelarasan strategi pembiayaan dan portofolio kredit yang mengacu pada taksonomi hijau Indonesia.

Menurut Kartika, dukungan perbankan pada transisi energi tidak cukup hanya berhenti di sisi hulu, juga harus ke hilir. “Hilirisasi bahan baku seperti nikel merupakan kunci strategis dalam pengembangan industri kendaraan listrik yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman



dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menyinggung pentingnya peran sektor jasa keuangan, terutama perbankan, dalam mendorong pembiayaan hijau. Menurutnya, pemerintah memiliki enam agenda utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Di antara agenda utama pemerintah itu adalah industrialisasi melalui hilirisasi dan dekarbonisasi untuk mempercepat *nett zero*.

Luhut juga menyoroti peran strategis pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, agenda-agenda ekonomi berkelanjutan membutuhkan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menggerakkan sektor riil dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Saat ini isu-isu terkait *environmental, social, and governance (ESG)*

## Dua Isu Utama RUA PERBANAS

# P

ERBANAS menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) pada Kamis, 20 Juli 2023. Forum tertinggi asosiasi industri

perbankan ini adalah ajang tahunan untuk mendengarkan laporan kinerja ketua umum dan jajaran pengurus, sekaligus pemaparan agenda kerja ke depan.

Selain forum pertanggungjawaban pengurus organisasi, RUA menjadi tempat berdiskusi pelaku industri jasa keuangan bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PERBANAS turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai *keynote speaker*.

Untuk diskusi panel, PERBANAS mengundang sejumlah pembicara, di antaranya Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Mari Elka Pangestu; Ketua Badan Pengawas Perbanas, Muhammad Chatib Basri; dan mantan bankir yang kini menjadi Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), Ridha DM Wirakusumah.

“Kami menyelenggarakan diskusi panel bertajuk *Sustainable Finance: Indonesia’s Economic Transformation towards a Nature-Positive Future*. Kami memilih tema ini untuk lebih memahami dua isu utama yang saat ini sangat relevan bagi industri. Pertama, perspektif makro tentang transformasi ekonomi dan strategi pemerintah dalam mengimplementasikan *SDGs* di Indonesia. Kedua, rencana pengembangan dan peran perbankan dalam mendorong terwujudnya keuangan berkelanjutan yang komprehensif,” ujar Ketua Umum PERBANAS, Kartika Wirjoatmodjo.

serta pengelolaan iklim juga telah menjadi topik utama para pemimpin dunia. Berbagai negara pun telah mengambil tindakan serius dalam mengatasi perubahan iklim dan implementasi *ESG*.

Menurut Luhut, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut berkomitmen melalui *enhanced nationally determined contribution* yang tujuannya mengurangi emisi gas rumah kaca hingga sebesar 31,9% pada 2030 serta *net zero emissions (NZE)* pada 2060. ■

# Tak Kunjung Berlari Didorong Kebijakan Sapih UUS

Peraturan OJK terkait dengan *spin off* UUS dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah belum mampu “berlari” kencang sesuai harapan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2023 mengenai kewajiban pemisahan atau “spin-off” bagi unit usaha syariah (UUS).

POJK ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terkait dengan persyaratan pemisahan UUS dari induknya.

Menurut Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Adiwarman Azwar Karim, POJK terkait dengan *spin off* UUS tidak akan optimal mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Seperti diketahui, sebelumnya ketentuan tentang *spin off* diatur dalam Pasal 68 Ayat 1 UU Perbankan Syariah. Pasal lama ini menyebutkan bahwa UUS wajib *spin off* ketika asetnya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya dan/atau 15 tahun setelah berlakunya regulasi tersebut, tepatnya pada pertengahan 2023. Dengan berlakunya POJK



yang baru, UUS hanya wajib *spin off* bila memenuhi persyaratan dari OJK.

Seperti di Malaysia, Adi mencontohkan, ketika belum ada peraturan untuk *spin off* UUS, perbankan syariah di negara tersebut stagnan. Namun, ketika pada 2005

## Tidak Ada Best Practice Di Negara Lain

MESKI telah dikonsultasikan kepada banyak pihak, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mewajibkan bank untuk men-*spin off* unit usaha syariah (UUS)-nya tetap dicantumkan. Padahal, pemisahan atau *spin off* bank syariah bukan merupakan pilihan terbaik. Apalagi, tidak ada *best practice* di negara lain.

“Di negara Islam seperti Saudi, UAE, Pakistan, Qatar, bahkan Malaysia, tidak ada ketentuan mengenai regulasi pemisahan UUS. Bahkan, di negara-negara tersebut UUS menjadi tumpuan bagi pertumbuhan bank syariah,” ujar Anggito Abimanyu, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

*Spin off* UUS, tambahnya, seharusnya terjadi karena dorongan pasar, bukan karena regulator. Seperti diketahui, OJK mewajibkan UUS perbankan untuk melakukan *spin off* jika sudah memenuhi ketentuan tertentu. POJK 12 mensyaratkan UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total nilai aset induknya atau paling sedikit Rp50 triliun, wajib melakukan pemisahan UUS.

“Sebagian besar UUS di Indonesia belum memenuhi alternatif persyaratan tersebut. Namun, ketentuan tersebut justru menghambat pertumbuhan perbankan dengan prinsip syariah. Paling lama dua tahun setelah laporan keuangan menyebutkan UUS dengan total asetnya sudah memenuhi ketentuan, wajib *spin off*,” ujarnya.





**“Kita duga keadaan akan berbalik sehingga POJK yang kurang optimal terkait *spin off*, tetapi dengan adanya penunjukan Direktur Eksekutif KNEK yang baru dan adanya proses pilpres (pemilihan presiden), pileg (pemilihan legislative), dan pilkada (pemilihan kepala daerah), akan mendorong terjadinya konversi dan *spin off* beriringan dengan proses itu terjadi.”**

**Adiwarman Azwar Karim**

Malaysia melakukan *spin off*, pertumbuhan perbankan syariah di negara itu berkembang pesat.

“Kita duga POJK yang akan keluar kurang begitu optimal nanti untuk mendorong adanya *spin off* dari UUS sehingga kita harus bersabar untuk menghadapi hal tersebut,” ujar Adi dalam *webinar* bertajuk “Refleksi Perkembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah di Indonesia ISEI”, pada 11 Juli 2023.

Adi juga menilai, belum adanya pejabat definitif yang duduk di kursi Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) setelah Ventje Rahardjo mengundurkan diri, menghambat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Di lain sisi, pada 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Menurut Adi, hal itu akan membalikkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah. Seiring dengan penyelenggaraan pemilu, akan ada yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Direktur Eksekutif KNEKS.

“Kita duga akan membalikkan keadaan sehingga POJK yang kita duga kurang optimal *spin off*, namun dengan adanya penunjukan Direktur Eksekutif KNEKS yang baru dan adanya proses pilpres (pemilihan presiden), Pileg (pemilihan umum legislatif), dan pilkada (pemilihan kepala daerah), ini kami duga akan mendorong terjadinya konversi dan *spin off* beriringan dengan proses itu terjadi,” ungkapnya.

Di tengah kontroversi *spin off* UUS, kinerja bank syariah di paruh pertama 2023 justru berhasil melampaui performa bank konvensional di industri perbankan nasional. Berdasarkan data OJK, aset perbankan konvensional per Mei 2023 tercatat tumbuh 6,47% secara *year on year* (yoy) dengan pertumbuhan kredit 8,67%. Sementara, aset bank syariah beserta UUS melesat 15,52% dengan pertumbuhan pembiayaan di level 14,69% yoy. ■



## SPIN OFF BUKAN SATU-SATUNYA OPSI

*SHARIA Banking Director* Bank CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menilai bahwa *spin off* bukan merupakan satu-satunya kunci untuk mendongkrak geliat perbankan syariah. Masih banyak opsi lainnya untuk mengoptimalkan potensi industri syariah di dalam negeri. “Masih banyak berbagai alternatif cara yang lebih efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan perbankan syariah tanpa *spin off*,” ujar Pandji di Jakarta, Rabu, 27 September 2023.

Menurut Pandji, beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk mendorong industri perbankan syariah Indonesia agar makin maju, di antaranya melalui keberpihakan regulasi terhadap perbankan syariah, stimulus dan insentif bagi perbankan syariah, mendorong peningkatan *demand* terhadap perbankan syariah, dan optimalisasi undang-undang (UU) sinergi perbankan.

“Lalu, *review* POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12 Tahun 2023, khususnya mengenai *spin off*. Kalau ini tujuannya menguatkan dan industri merasa ini tidak menjadikan mereka kuat, kenapa tidak diubah. Kadang-kadang ini yang jadi buah simalakama,” tegasnya.

Pandji menambahkan, industri perbankan syariah diharapkan mendapat kemudahan dalam pengembangan produk dan layanan. Dan, terkait dengan sinergi antarlembaga, seperti dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), industri perbankan syariah juga perlu diberikan insentif ketika meminta sebuah usulan.

“Lalu, literasi dan inklusi juga menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Saya membayangkan, kalau misalnya kita bisa melakukan sertifikasi terhadap seluruh bank yang melakukan UU sinergi perbankan, itu bagus sekali. Karena, saya selalu percaya, kalau kita mau melakukan literasi dan inklusi, yang harus diajarkan bukan *market*-nya dahulu, tetapi orang banknya,” terang Pandji. ■

# Navigasi Hadapi Tiongkok Effect di Tahun Naga Kayu

**Perekonomian nasional 2024 akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok. Perbankan perlu waspada. Apalagi, per Maret 2024 restrukturisasi untuk UMKM akan berakhir dan berpotensi mendongkrak kredit bermasalah.**

**M**emasuki tahun “Naga Kayu” 2024, sikap waspada masih dibutuhkan untuk bisa selamat dari gelombang ketidakpastian. Diperkirakan, perlambatan ekonomi global akan berlanjut pada tahun depan, karena pemulihan ekonomi Tiongkok lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, bank-bank sentral melanjutkan siklus kenaikan suku bunga sampai dengan semester kedua 2023, sehingga memperpanjang dampaknya terhadap perekonomian.

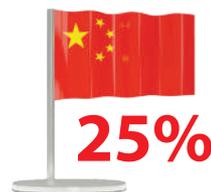
“Seiring dengan perlambatan perekonomian global, perekonomian domestik diperkirakan akan melambat. Permintaan domestik mungkin melemah di tengah rendahnya pendapatan ekspor dan perilaku investor yang berhati-hati,” ujar Wisnu Wardhana, *Chief Economist* Bank Danamon, dalam “CFO Forum: Navigasi Tantangan Perbankan” yang digelar Perbanas, Rabu, 27 September 2023.

Menanggapi pelemahan ekonomi, BI akan mulai menurunkan suku bunga kebijakan menjadi 5,25% pada tahun depan, mengikuti poros kebijakan The Fed. Sementara, rata-rata nilai tukar rupiah akan terapresiasi pada tahun depan, sebagai akibat dari siklus pemotongan *Fed Fund Rate (FFR)*. Namun, menjelang akhir tahun, melebarnya defisit transaksi berjalan akan menimbulkan volatilitas pada nilai tukar rupiah

Indikator ekonomi AS tampak lebih kuat dari perkiraan. Inflasi tetap tinggi tahun ini, di atas target The Fed sebesar 2%. The Fed telah mengisyaratkan bahwa kebijakan suku bunga mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga. Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) terbaru pada 23 September 2023 lalu menghasilkan sikap lebih tinggi untuk jangka panjang.

Persediaan pasar minyak global semakin ketat di tengah pengurangan produksi dan peningkatan permintaan secara bertahap. Harga minyak meningkat hingga di atas US\$90 per barel, karena berlanjutnya pengurangan pasokan minyak oleh negara-negara OPEC+. Secara historis, kenaikan harga minyak diikuti oleh kenaikan *FFR*. “Namun, MUFG memperkirakan harga minyak akan tetap di bawah US\$100

**NEGARA  
TUJUAN  
EKSPOR  
INDONESIA**



Sumber: BPS/Agustus 2023

per barel dalam beberapa tahun ke depan, mengingat pemilu AS tahun depan dan mandat stabilitas jangka menengah OPEC+,” ujar Wisnu.

Inflasi dalam negeri telah kembali ke target tertinggi BI sejak 23 Mei. Angka terakhir menunjukkan bahwa inflasi mencapai 3,3% *year on year (yoy)*. Ke depan, inflasi diperkirakan akan tetap berada pada kisaran target BI sebesar 2%-4% pada 2023 dan 1,5%-3,5% pada 2024, didukung oleh berkurangnya tekanan biaya input.

“Risiko utama dari perkiraan kami terletak pada harga minyak global. Harga minyak dalam negeri akan disesuaikan jika harga minyak naik di atas US\$120 per barel, yang diikuti dengan lonjakan inflasi,” tuturnya.

Menurut Wisnu, perekonomian Tiongkok yang terus melemah di tengah kemerosotan sektor properti dan lemahnya pemulihan permintaan domestik juga memengaruhi perekonomian nasional. Sebab, Tiongkok selama ini menjadi destinasi ekspor terbesar Indonesia dengan *market share* sebesar 25%. Karena itu, menurunnya produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic product (GDP)* Tiongkok membawa pengaruh negatif bagi PDB Indonesia.

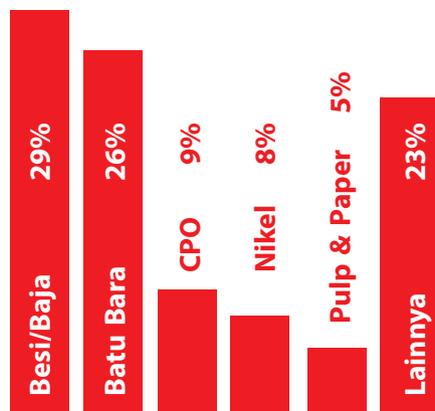
“Pada episode ini, komoditas energi diuntungkan karena perang Rusia-Ukraina dan kenaikan harga minyak turun

## ASUMSI MAKRO INDONESIA 2024

|                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|
| <b>GDP</b>      | 5,3  | 5,2  | 4,9  |
| <b>Inflasi</b>  | 5,5  | 2,7  | 2,9  |
| <b>BI7DRR</b>   | 5,50 | 6,00 | 5,25 |
| <b>LPS Rate</b> | 3,75 | 4,50 | 4,00 |
| <b>Kredit</b>   | 11,0 | 9,0  | 7,2  |
| <b>DPK</b>      | 8,7  | 7,1  | 5,4  |
| <b>LDR</b>      | 78,8 | 84,7 | 86,2 |

Sumber: BPS, BI, LPS, OJK

## PANGSA BARANG EKSPOR KE TIONGGOK



Sumber: BPS/Agustus 2023

meningkatkan permintaan batu bara. Sementara itu, barang konsumsi dan komoditas terkait infrastruktur terkena dampak perlambatan ekonomi China (Tiongkok)," paparnya.

Saat ini, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,2% yoy (Q2/2023), di atas ekspektasi pasar serta realisasi sebelumnya sebesar 5,0%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi yang berkaitan dengan perayaan. "Ke depan, kami memperkirakan pertumbuhan akan melambat menjadi 4,9% yoy pada tahun 2024 karena melemahnya daya beli, yang tercermin dalam pertumbuhan simpanan (terutama segmen kelas bawah dan atas)," kata Wisnu.

Terkait industri perbankan, Wisnu menambahkan, sejalan dengan normalisasi likuiditas, pertumbuhan simpanan menurun sebesar 0,6% year to date (ytd) per 23 Agustus. Sementara, pinjaman tumbuh sebesar 5,2% ytd. Dengan demikian, *loan to deposit ratio* (LDR) meningkat menjadi 82% pada Agustus 2023 dari 78% pada Desember 2022.

"Per 24 Maret 2024, kebijakan restrukturisasi UMKM akan berakhir, sehingga menimbulkan risiko NPL yang lebih tinggi," *warning* Wisnu. ■

## Mitigasi Risiko dengan Integrasi NIK & NPWP

Pada "CFO Forum: Navigasi Tantangan Perbankan" yang diselenggarakan Perbanas di Financial Club, Graha CIMB Niaga, Rabu, 27 September 2023, mengemuka tentang rencana integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Kita mendukung program Dirjen Pajak terkait integrasi NIK dan NPWP. Perbankan diharapkan berperan aktif dalam melakukan penyesuaian NPWP dengan nasabah, karyawan, vendor, dan investor. Ini menjadi tantangan bagi perbankan terkait pinjaman terstruktur pada waktu yang tidak panjang," ujar Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, saat membuka acara.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kata dia, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara perbankan dan pemerintah sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Kolaborasi ini penting dilakukan untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang di masa depan.

Menurut Hantriono Joko Susilo, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak, integrasi NIK dan NPWP ini membantu perbankan dalam memitigasi risiko nasabah berisiko tinggi. Misalnya, nasabah yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, bank akan mengetahui setelah pertukaran data antara perbankan dan Ditjen Pajak.

"Ditjen Pajak sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI selaku regulator untuk menyiapkan regulasi dan sistemnya untuk pemotongan bunga tabungan dan deposito di bank. Ini akan diterapkan ke semua bank. Perbankan masih punya waktu 6-7 bulan untuk mulai menerapkan sistem baru dengan NPWP 16 nomor," ujar Hantriono.

Sementara itu, Teddy Pirngadi, Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan Laporan BI, dalam kesempatan sama memaparkan tentang topik "Common Error dalam Pelaporan Antasena". Menurutnya, berdasarkan hasil *monitoring* melalui pemeriksaan tematik LBUT KI Keuangan Bulanan tahun 2022 dan *coaching clinic* LBUT tahun 2023, masih terdapat *common error* dalam kualitas data pelaporan LBUT BI Antasena yang disebabkan oleh *people*, *process*, dan *technology*.

Kesalahan pada *people* terjadi saat penginputan data pada *core banking* dan/atau data manual oleh petugas dan kapasitas petugas dalam menerjemahkan sumber data/dokumen sesuai pedoman pelaporan. Kesalahan pada proses yakni saat dokumentasi data nasabah kurang mendukung/mencukupi, SOP belum sempurna atau masih mengacu kepada metode pelaporan lama, dan penetapan kriteria (*filtering*) kualitas data kurang lengkap.

Sementara, kesalahan terkait teknologi terjadi saat pengambilan sumber data yang tidak tepat (*mapping source data* kurang sesuai), kesalahan *setting* aplikasi dan formulasi perhitungan, dan kekeliruan *logic* pada sistem.

Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs & Legal di PT Bank CIMB Niaga Tbk

# Strategi Bank Hadapi "Debitur Sontoloyo"

**Apa yang mesti dilakukan bank ketika menghadapi "debitur sontoloyo" alias debitur yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya? Apa pula yang mesti disiapkan bank untuk menerapkan ESG?**

**B**elakangan marak terdengar kasus debitur atau nasabah yang memperkarakan bank tempatnya meminjam uang ke aparat hukum. Bukannya beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, "debitur sontoloyo" ini justru malah menantang bank yang memberikan pinjaman tersebut untuk bertarung di meja hijau.

Apa yang mesti dilakukan bank jika menghadapi "debitur sontoloyo"? Ketua Bidang Pengembangan Kajian Hukum dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Fransiska Oei, memberikan saran dan masukan yang disampaikan kepada *PERBANASNews*, bulan lalu.

Direktur Kepatuhan Bank CIMB Niaga yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) itu juga memberikan masukan terkait penerapan bisnis berkelanjutan yang berlandaskan prinsip ESG. Berikut petikannya:

***Ketika ada nasabah tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan bahkan malah memperkarakan pihak bank secara hukum, bagaimana Perbanas melihat ini?***

Sebenarnya hal demikian bukanlah hal yang baru. Dari zaman dulu sudah ada nasabah yang iktikadnya kurang baik dan malah melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Mungkin saat ini terlihat makin marak, karena sekarang era sosial media (sosmed), jadi semakin *booming*. Oleh karenanya, berita-berita yang demikian, yang tadinya ada namun tak terlihat, sekarang jadi kelihatan.

Kemudian, memang tren digital dewasa ini selain membawa dampak positif, juga

membawa risiko tersendiri. Dengan adanya *fraud* yang menggunakan sosial media, serta memancing orang untuk memberikan data dan lainnya, sehingga makin banyak kelihatannya. Tapi, sekali lagi, ini bukanlah hal yang baru.

***Apa yang seharusnya dilakukan bank ketika menghadapi kasus-kasus demikian?***

Pencegahan itu penting. Jadi, bagaimana kita selaku (pelaku) perbankan dapat melakukan pencegahan dari tahap awal sekali, yakni pengenalan nasabah. Nasabah ini siapa *sih*? Yang jadi masalah mungkin terkadang kita ingin cepat memberikan pelayanan yang baik. Namun, jika tidak mengindahkan kehati-hatian yang cukup, memang akan jadi berisiko.

Lalu, lakukan analisis kredit terhadap nasabah. Misalnya, kalau dia ritel, pendapatannya dari mana, apakah data yang diberikan sesuai dengan profil yang diberikan. Nah, kalau sudah dilakukan analisis secara baik, selanjutnya adalah soal dokumentasi. Dokumentasi kita itu juga harus cukup transparan, berimbang, tapi juga memerlukan proteksi. Maka dari itu, dibutuhkanlah kegiatan *monitoring*.

Sehingga, kita bisa melihat kalau ada indikasi-indikasi yang kurang baik, kita bisa melakukan tindakan. Nah, kalau semua tahapan ini telah dilakukan, dan ternyata dibawa ke ranah hukum, ya kita harus lakukan sebaik-baiknya untuk mengikuti proses hukumnya itu.

***Menurut PERBANAS, apakah hukum positif di Indonesia sudah cukup memadai untuk memberikan perlindungan bagi pihak perbankan?***

Sebenarnya, perangkat hukum positif itu



sudah cukup ada. Saya bicara secara struktur itu sudah ada. Kita sudah punya pengadilan. Kita juga punya yang namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang khusus untuk jasa keuangan.

Sebetulnya perangkat hukum positifnya sudah cukup lengkap. Ketika kasusnya ini kompleks, pertanyaannya adalah apakah yang menjadi bagian dari perangkat hukum itu cukup menguasai atau tidak? Itu juga menjadi satu bagian yang perlu kita lihat.

**Dari perangkat hukum positif yang ada, apa masukan Perbanas kepada pemerintah atau pihak terkait?**

Soal perangkat hukum memang sudah cukup komplet.

Namun, ada satu hal yang terkadang membuat sebuah kasus jadi lama sekali proses penyelesaiannya. Kalau saya bandingkan dengan luar negeri, penyelesaian kasus melalui ranah hukum sangat cepat dan transparan. Di sini penyelesaian kasusnya cukup lama dan terkadang juga kurang transparan, kurang jelas. Ini membuat biaya di bank meningkat.

Kalau ditanya, kenapa di Indonesia suku bunga bank mahal sekali dibandingkan dengan di luar negeri? Ini salah satu yang perlu dipertimbangkan. Karena kalau ada masalah hukum, lama sekali penyelesaiannya, serta tidak jelas hasilnya. Menurut kita, seharusnya ini sudah jelas, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Prosesnya masih belum transparan.

**Kemudian, terkait ESG, sesuai bidang tugas Anda di Perbanas, apa saja program ESG yang sedang atau telah dilakukan Perbanas untuk anggotanya?**

Perbanas melihat isu ESG ini sebagai sesuatu yang penting sekali. Bidang ESG ini tadinya tidak ada di Perbanas. Karena makin ke sini, kita merasa ini makin penting, jadi kita tambah bidang ESG ini. Di bidang saya ini ada dua bidang, yakni hukum dan ESG.

Apa yang sudah kita lakukan terkait ESG? Salah satu yang telah kita lakukan berdasarkan masukan dari anggota-anggota kami, yakni mengenai penerapan taksonomi hijau Indonesia. OJK telah memiliki program taksonomi hijau Indonesia yang juga sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Taksonomi hijau ini ada tantangannya tersendiri bagi lembaga perbankan, khususnya bank-bank kecil.

Pada awalnya, kita menerapkan ini pada beberapa bank. Sekarang semua bank itu harus melaporkan taksonomi hijau nasabah-nasabah untuk dikategorikan sesuai dengan *guide-line* yang diberikan dalam program taksonomi hijau Indonesia.

Di samping itu, kita melakukan sosialisasi untuk



menyampaikan betapa pentingnya ESG. Kita juga memiliki wacana untuk membuat sebuah komite khusus terkait bidang ESG dan lainnya. Karena, cara kita melihat ESG ini bisa negatif, dalam arti coba kita kurangi emisi-emisi industri yang tinggi.

Trus, kita mau apakan industri ini setelah itu? Sementara, dari sisi positifnya, kita bisa melihat ini sebagai peluang, dalam arti para nasabah yang memiliki emisi tinggi bisa mencoba untuk mengubah bisnisnya ke emisi yang rendah.

Untuk mengubah bisnisnya ini dibutuhkan modal. Di sinilah peluang perbankan untuk bisa mendukung nasabahnya. Komite itu nantinya akan mendiskusikan cara bagaimana kita bisa mendukung nasabah maupun

pemerintah untuk bertransisi ke emisi yang rendah.

**Menurut Anda, apakah sebagian besar bank sudah aware dengan penerapan ESG ini?**

Bank-bank sudah *aware* terkait penerapan ESG, karena sudah ada POJK-nya juga, yakni POJK 51 Tahun 2017. Semua perbankan sudah menjalankan yang namanya rencana aksi berkelanjutan, laporan berkelanjutan atau *sustainability report*.

Itu semua bank sudah melakukan. Namun, kalau ditanya *maturity* atau kematangan pengetahuannya akan penerapan ESG, itu memang bervariasi. Dari bank yang sudah sangat ahli di ESG sampai yang masih belum di level ahli.

**Terkait penerapan ESG, apa saran yang bisa diberikan ke industri, regulator, atau pemerintah?**

Pertama kepada pemerintah. Terkait ESG ini memerlukan suatu kolaborasi yang baik, misalnya antara kementerian yang satu dan yang lain. Kalau jalan masing-masing, itu sulit.

Kolaborasi itu sangat penting. Pada satu sisi, kita didorong untuk mendukung energi terbarukan. Namun, nasabah yang ingin mengubah bisnisnya ke energi bersih itu masih sedikit sekali. Kenapa? Karena, biayanya mahal. Sedangkan, kalau beli listrik di PLN itu lebih murah.

Pemerintah masih melakukan pembatasan penjualan batu bara untuk pembangkit listrik. Maka, akan sulit bersaing bagi nasabah kami yang ingin bertransisi ke energi terbarukan, karena harga listrik dari PLN yang memakai batu bara itu lebih murah.

Kedua, terkait regulasi. Regulasi-regulasi yang ada diharapkan bisa lebih jelas, sehingga kami dalam melakukan penerapan itu jadi lebih mudah. Terakhir, terkait dengan *enforcement*. Misalnya, ada suatu industri yang harus melakukan sertifikasi untuk amdal, ISPO, atau pajak karbon, itu lebih baik jika benar-benar diwajibkan. Karena, kalau sekadar anjuran, *reput*. Nasabah mungkin ada yang menerapkan, ada yang tidak. ■

# Bank-Bank Panen Cuan di Tengah Tahun 2023

Di tengah meningkatnya ancaman krisis perbankan global, kinerja perbankan di Indonesia masih ciamik. Fungsi intermediasi masih berjalan dengan baik. Indikator keuangan utama menunjukkan perbankan nasional dalam keadaan sehat.

**P**erbankan Indonesia *pancen oye*. Buktinya, walaupun sejumlah bank besar di Amerika Serikat dan Eropa kolaps, kondisi perbankan nasional hingga kini masih baik-baik saja. Bahkan, berdasarkan data kinerja semester I-2023, kinerja bank-bank nasional justru mengalami kenaikan signifikan. Indikator keuangan utama, seperti kredit dan dana pihak ketiga (DPK), bertumbuh dua digit. Hal ini yang membuat bank-bank nasional, khususnya bank-bank raksasa, berhasil memetik laba jumbo.

Dalam catatan *PerbanasNews*, dari 10 bank terbesar di Indonesia dengan total aset per Desember 2022 sebesar Rp7.923,42 triliun atau menguasai 71,30% aset perbankan nasional, hampir semua mencatatkan kinerja positif. Hasil, mereka masih berhasil memanen cuan di 2023.

Empat bank di kelompok bank modal inti (KBMI) 4 dengan modal di atas Rp70 triliun, misalnya, semua berhasil mengolek cuan besar. Bank Mandiri, sebagai bank dengan aset terbesar, yakni Rp1.992,54 triliun per Desember 2022, berhasil memetik laba Rp25,23 triliun pada semester I-2023 atau naik 24,9% secara tahunan (*year on year/yoy*). Laba jumbo Bank Mandiri di antaranya ditopang oleh kenaikan penyaluran kredit sebesar 11,8% menjadi Rp1.272 triliun.

DPK Bank Mandiri juga merambat naik dengan tingkat pertumbuhan 8,47% (*yoy*) menjadi Rp1.430 triliun. Kenaikan DPK Bank Mandiri di-*booster* dengan kenaikan dana murah, masing-masing 21,2% untuk giro dan 5,8% untuk tabungan. Kenaikan dana murah ini membuat rasio *current account savings account (CASA)* naik dari 70,8% menjadi 73,4%.

BRI, meski secara aset berada di posisi terbesar kedua, namun berhasil menanggung laba lebih jumbo, yakni sebesar Rp29,56 triliun atau naik 18,7% *yoy*. Perolehan laba bank terbesar di Tanah Air ini tak lepas dari pendapatan bunga bersih BRI yang naik 1,43% menjadi Rp 65,54 triliun pada semester I-2023. BRI juga berhasil meningkatkan penyaluran kredit secara konsolidasi sebesar 5,54% *yoy* menjadi Rp1.202,13 triliun.

Sebagai bank swasta nasional terbesar, BCA juga

**Dalam catatan *PerbanasNews*, dari 10 bank terbesar di Indonesia dengan total aset per Desember 2022 sebesar Rp7.923,42 triliun atau menguasai 71,30% aset perbankan nasional, hampir semua mencatatkan kinerja positif.**

mengalami pertumbuhan signifikan. Sepanjang semester pertama tahun ini, BCA berhasil membukukan kenaikan laba bersih 34% menjadi Rp24,2 triliun *yoy*. Kenaikan laba tersebut didorong oleh kenaikan volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, dan peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

“Segmen kredit konsumen terus mencatatkan pertumbuhan. Kami melihat momentum permintaan kredit yang kuat dari sektor UMKM, sejalan dengan peningkatan aktivitas bisnis di segmen tersebut,” ujar Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.

Yang menarik, penyaluran kredit BCA ke sektor-sektor berkelanjutan naik 6,9% *yoy* mencapai Rp181,2 triliun di Juni 2023. Ini berkontribusi hingga 24,3% terhadap total portofolio pembiayaan BCA. Untuk pembiayaan kendaraan bermotor listrik, misalnya, BCA menggelontorkan hingga Rp751 miliar per Juni 2023, atau tumbuh 44 kali lipat secara *yoy*.

BNI juga mengalami pertumbuhan laba cukup signifikan, yakni 17% menjadi Rp10,3 triliun sepanjang semester pertama 2023. Tahun sebelumnya laba BNI sebesar Rp8,87 triliun. Hingga akhir kuartal II-2023, kredit konsolidasi BNI mencapai Rp650,8 triliun. Sementara, dari sisi likuiditas, BNI berhasil mendongkrak DPK sebesar 10,6% *yoy* menjadi Rp765 triliun.

Bank-bank di KBMI 3 atau kelompok bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun juga mengalami pertumbuhan positif. Dari 14 bank penghuni KBMI 3, semua

mandiri

1.992,54  
TRILIUN

BRI

1.865,64  
TRILIUN

# 10 BANK ASET TERBESAR DI INDONESIA (Per Desember 2022)

BCA

1.314,73  
TRILIUN

BNI

1.029,84  
TRILIUN

Bank BTN

402,15  
TRILIUN

CIMB NIAGA

306,75  
TRILIUN

BSI  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

305,73  
TRILIUN

PermataBank

255,11  
TRILIUN

OCBC NISP

238,50  
TRILIUN

PaninBank

212,43  
TRILIUN

Sumber: OJK/Diolah

berhasil mendulang laba di semester I-2023. Meski ada juga yang labanya turun dibandingkan dengan semester I-2022 lalu. Itu pun hanya empat bank, yaitu Bank Danamon, BTN, BTPN, dan Bank BJB.

Di kelompok ini bahkan ada satu bank yang berhasil mendongkrak perolehan laba hingga 99,13%, yakni Bank Mizuho Indonesia. Bank ini meraup laba Rp689 miliar pada semester satu ini, terbang dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp346 miliar. Kenaikan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih (*net interest income/NII*) sebesar Rp90,32% menjadi Rp984 miliar pada semester I-2023.

Pertumbuhan laba spektakuler juga sukses diraih Bank UOB Indonesia. Bank ini tercatat berhasil mencetak laba bersih Rp646,81 miliar pada semester I-2023 atau 52,87% secara tahunan dari sebelumnya Rp423,18 miliar. Kenaikan laba bersih didorong oleh kinerja pendapatan bunga bersih yang naik 23,52% yoy menjadi Rp2,72 triliun pada paruh pertama 2023.

Bank anggota KBMI 3 yang berhasil mendongkrak perolehan laba di atas 20% adalah Bank Maybank Indonesia yang naik 43,43% menjadi Rp987,47 miliar, lalu Bank Syariah Indonesia (BSI) naik 32,41% menjadi Rp2,82 triliun, Bank Mega naik 32% menjadi Rp1,97 triliun, PaninBank naik 30,89% menjadi Rp2,09 triliun, Bank CIMB

Niaga naik 27,34% menjadi Rp3,26 triliun, PermataBank naik 25,5% menjadi Rp3 triliun, dan Bank OCBC NISP naik 25% menjadi Rp2,1 triliun.

Menurut ekonom Institute of Socia Economic and Digital (ISED) dan Associate Faculty LPPI, Ryan Kiryanto, pertumbuhan perbankan di Indonesia positif karena perkembangan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan yang stabil setelah dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia.

"Mengingat prinsip *banks follow economy, business and industry*, maka sejauh perkembangan ekonomi Indonesia baik-baik saja, seperti terlihat dari beberapa data ekonomi utamanya: PDB tumbuh berkisar 5%, inflasi terkendali 2%-4%, indeks PMI di zona ekspansi berkisar 51, konsumsi masyarakat dan investasi langsung meningkat, maka pertumbuhan kredit tahun ini tetap cukup tinggi berkisar 10%-12%," ujar Ryan.

Capaian tersebut, kata dia, didorong oleh volume ekonomi yang meningkat, arus masuk modal asing berlanjut, dan suku bunga perbankan di dalam negeri masih menarik. "Itu semua akan membawa kinerja perbankan nasional tetap positif, ditandai pertumbuhan profit yang signifikan, karena memiliki likuiditas dan permodalan yang sangat memadai," tutupnya. ■

# Untung Rugi Premi Program Restrukturisasi

**Bank diwajibkan membayar premi Program Restrukturisasi Perbankan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah aset dan profil risiko. Apa untung ruginya bagi bank?**

**K**risis keuangan global sewaktu-waktu bisa mengancam sistem perbankan Indonesia dan kembali memicu krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Presiden Joko Widodo telah menekan beleid pembayaran premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada 16 Juni lalu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan PRP. Dalam program itu, bank membayar premi sebagai bagian dari premi penjaminan yang besarnya menjadi tambahan dari premi penjaminan yang dikenakan kepada bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Dewan Komisiner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa PRP dimaksudkan untuk meredam permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Belajar dari kejadian di masa lalu, krisis keuangan membuat perbankan kesulitan sehingga negara harus turun tangan untuk menanganinya.

"PRP itu desainnya seperti ini. Waktu tahun 1998, ketika perbankan morat-marit, yang bayar 'kan negara. Biayanya 50% dari PDB (produk domestik bruto). Nanti dari situ ada pemikiran, *gimana* kalau ada pengurangan beban ke negara apabila negaranya kacau seperti itu. Maka, keluarlah program PRP itu," ujar Purbaya di Jakarta, Juni lalu.

Purbaya mengatakan, PRP akan aktif jika terjadi krisis keuangan dan atas sinyal atau perintah dari presiden. Karena itu, dana PRP tersebut digunakan untuk menjaga industri perbankan dari krisis keuangan. Selain itu, aturan tersebut diterbitkan sebagai upaya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada kepanikan seperti di krisis keuangan 1998 karena industri dan pemerintah saling menjaga.

Di lain sisi, Purbaya memprediksi bahwa pembayaran premi ini akan menaikkan bunga bank. Namun, keputusan tersebut kembali lagi ke perbankan sendiri. Ia meyakini bahwa pembayaran premi tidak akan memberatkan perbankan. "Mungkin bunga mereka naik, tapi saya *enggak*

tahu, tapi 'kan kalau dilihat margin perbankan masih besar. Jadi, Anda *enggak* usah takut, mungkin dia akan lebih kompetitif. Yang jelas tidak akan membuat banknya menjadi susah karena sudah kami hitung," tuturnya.

Dengan adanya PRP, bank-bank harus bersiap merogoh kocek untuk membayar premi pertamanya di 2025. Pasal 5 PP Nomor 34/2023 menjelaskan bahwa pembayaran premi PRP wajib dilakukan bank kepada LPS sebanyak dua kali dalam setahun. Menurut Purbaya, total dana PRP itu masih tergolong kecil. Jika dihitung, dalam setahun total dana PRP akan terkumpul sebesar Rp1 triliun. Setelah 40 tahun terakumulasi, dana itu baru memenuhi target yang ditetapkan, yakni 2% dari PDB 2022.

Hal senada disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae. Ia menyebutkan bahwa premi untuk mendanai PRP tidak akan memberatkan industri perbankan. "Premi PRP yang mulai diberlakukan pada 2025 memang akan menambah beban perbankan, tapi diyakini tidak akan memberatkan industri perbankan karena sebetulnya relatif rendah dibandingkan keuntungan perbankan selama ini," ujar Dian, Juli lalu.

Menurut Dian, PRP sudah sesuai dengan praktik terbaik di dunia perbankan internasional guna mengantisipasi risiko terburuk di industri keuangan global. Nantinya, jika terjadi skenario terburuk di industri perbankan, pemerintah tidak akan melakukan *bail out* untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan perbankan yang mengalami krisis.

Lebih lanjut, ia menambahkan, besaran premi di setiap bank juga berbeda-beda. Besaran premi dihitung sendiri dan wajib dibayarkan bank dengan besaran persentase tertentu yang dihitung dari kombinasi kelompok bank berdasarkan jumlah aset dan tingkat risiko bank yang dikalikan dengan jumlah aset bank.

Dian mengungkapkan, jumlah aset tersebut dihitung dari rata-rata total aset bank di posisi akhir bulan dalam setiap periode dan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan peringkat komposit bank terakhir dalam setiap periode. ■

**"PREMI PRP YANG MULAI DIBERLAKUKAN PADA 2025 MEMANG AKAN MENAMBAH BEBAN PERBANKAN, TAPI DIYAKINI TIDAK AKAN MEMBERATKAN INDUSTRI PERBANKAN KARENA SEBETULNYA RELATIF RENDAH DIBANDINGKAN KEUNTUNGAN PERBANKAN SELAMA INI."**

**Dian Ediana Rae,**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

# Ini Dia Dua ADK OJK Pilihan Presiden dan DPR

**Agusman dan Hasan Fawzi akhirnya terpilih sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2023-2028 setelah lolos seleksi tahap VI di Komisi XI DPR. Siapa Agusman dan Hasan Fawzi?**

Setelah melalui proses penjarangan oleh Panitia Seleksi (Pansel), Presiden, dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 11 April 2023, akhirnya dua nama ini terpilih sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) periode 2023-2028: Agusman dan Hasan Fawzi. Keduanya juga merangkap sebagai Kepala Eksekutif OJK.

Agusman merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sementara, Hasan Fawzi merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Agusman dan Hasan Fawzi terpilih setelah melalui enam tahap seleksi. Tahap I adalah seleksi administrasi yang meloloskan 45 kandidat dari ratusan pendaftar, termasuk mereka berdua. Tahap II adalah seleksi rekam jejak, masukan masyarakat, dan penulisan makalah. Di tahap ini lolos 19 orang.

Di tahap III dilakukan asesmen dan tes kesehatan oleh Pansel. Di tahap ini lolos delapan kandidat, yakni Budi Santoso, Iskandar Simorangkir, Adi Budiarmo, Rico Usthalvia Frans, Mardianto Eddiwan Danusaputro, Agusman, Erwin Haryono, dan Hasan Fawzi.

Seleksi tahap IV adalah afirmasi dan wawancara yang dilakukan oleh Pansel. Di tahap ini dua kandidat terpental, yakni Iskandar Simorangkir dan Rico Usthalvia Frans. Tersisa enam kandidat yang lolos ke tahap V, yakni seleksi di Istana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sini dua nama kembali gugur, yakni Budi Santoso dan Mardianto Eddiwan Danusaputro.

Keempat kandidat tersisa, yakni Agusman, Adi Budiarmo, Hasan Fawzi, dan Erwin Haryono, kemudian diserahkan ke Komisi XI DPR untuk dilakukan seleksi terakhir di tahap VI. Dan, dalam Rapat Komisi XI DPR pada Senin, 9 Juli 2023 lalu, nama Agusman dan Hasan Fawzi terpilih melalui hasil musyawarah mufakat dan *voting*, baik di tingkat pimpinan maupun anggota Komisi XI DPR.

Siapa sebetulnya Agusman dan Hasan Fawzi? Menurut berbagai sumber yang dihimpun *PERBANASNews*, Agusman diketahui saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI), yakni Kepala Departemen Audit Internal.

Lahir di Padang pada 1965, Agusman menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang akuntansi Universitas Andalas



pada 1989. Ia mendapat gelar master di bidang *economics & finance* dari Curtin University of Technology pada 1998 dan gelar *Ph.D* di bidang *banking & finance* dari Australian National University pada 2006.

Agusman memulai kariernya di BI pada 1992. Sejak 2020, Agusman menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan (2016-2017), Kepala Departemen Komunikasi (2017-2019), dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (2019).

Sementara, Hasan Fawzi saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), emiten baterai nikel milik konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir. Sebelum di MBMA, Hasan Fawzi pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diangkat pada 29 Juni 2018.

Lahir di Purwakarta pada 27 April 1970, Hasan Fawzi meraih gelar sarjana teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993 dan memperoleh gelar *master of business administration (M.B.A.)* dari Universitas LIAE de Grenoble, Universite Pierre Mendes, Prancis. Selain itu, Hasan memperoleh gelar magister manajemen (M.M.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 2008.

Hasan memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem (1993-1997), kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (1997-2008). Selanjutnya, ia menduduki kursi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia/PHEI (2008-2012) dan Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2015 dan 2015-2018). ■

# Poin Penting Peraturan OJK Tentang Cuci Uang

**POJK No. 8 Tahun 2023 memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan penyidikan tidak hanya terhadap yang di bawah pengaturan OJK, tapi juga industri keuangan.**

**K**asus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak awal tahun ini beberapa kali kembali mengemuka. Setelah kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 miliar di lingkungan Kementerian Keuangan, publik kembali dihebohkan dengan mencuatnya kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan pemilik Yayasan Al-Zaytun Panji Gumilang, disusul perkara TPPU gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Teranyar adalah penangkapan Dito Mahendra oleh Bareskrim Polri. Dito disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pencucian uang yang dilakukan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Banyak pihak menilai bahwa Dito menyimpan puluhan miliar rupiah dari kekayaan Nurhadi. Dibekuknya Dito di Bali pada Jumat (8/9/2023) sempat membuat gempar lantaran dia ditangkap dengan puluhan pucuk senjata api yang dimiliki secara ilegal.

Bergulirnya kasus pencucian uang memancing Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan aturan baru program anti pencucian uang. Di pertengahan tahun ini, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, mengatakan, aturan ini diterbitkan untuk memitigasi risiko terjadinya TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme (PPT), dan/ atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) yang berkembang dan mengancam negara.

"OJK sekaligus mencabut POJK No. 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23 Tahun 2019," ujarnya.

Mahendra menyatakan, POJK Anti Pencucian Uang (APU) PPT dan PPPSPM di SJK sudah selaras dengan prinsip internasional, antara lain *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

"POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung tujuan Indonesia menjadi anggota penuh *FATF*, di mana sektor jasa keuangan diukur secara signifikan," sambungnya.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK, antara lain mengatur Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib menerapkan

program APU PPT, kewajiban PJK memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian Individual Risk Assessment (IRA) bagi PJK.

Selain itu, lanjut Mahendra, aturan tersebut menambahkan contoh *countermeasures* yang perlu dilakukan PJK terhadap negara berisiko tinggi menurut FATF, menegaskan kewajiban Customer Due Diligence (CDD) PJK, dan menyempurnakan persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan pihak ketiga terkait verifikasi secara tatap muka dan nontatap muka elektronik.

"POJK terbaru ini juga mengatur penundaan atau penghentian sementara transaksi yang diketahui atau diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM, serta kewajiban nasabah dan pelaku usaha untuk menyampaikan data yang dibutuhkan melalui sistem pelaporan OJK," jelasnya.

Dia menambahkan, OJK memberikan waktu transisi bagi PJK selama paling lama enam bulan sejak diterbitkannya POJK dimaksud untuk segera melakukan penyesuaian.

Sementara, di bidang penyidikan, OJK diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal bertukar informasi maupun penyidikan bersama. Ketentuan mengenai penyidikan itu diatur melalui POJK Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

"PPATK '*kan* untuk TPPU-nya. Itu '*kan* memang kewenangan dari PPATK yang dalam prosesnya bisa melakukan proses penyidikan langsung, ataupun bekerja sama dengan OJK. OJK juga sama, dalam proses yang berkaitan dengan penyidikan terkait pencucian uang, bisa bekerja sama dengan PPATK," kata Mahendra pada Agustus lalu.

POJK yang baru tersebut merupakan bentuk simplifikasi aturan yang lama, serta memberikan mandat OJK untuk melakukan penyidikan tidak hanya terhadap yang di bawah pengaturan OJK, tapi juga industri keuangan yang berisiko secara keseluruhan.

Dengan diterbitkannya POJK tersebut, diharapkan ruang untuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme maupun senjata pemusnah massal bisa diminimalisasi. ■



## RUA IBI TAHUN 2023

# Warning IBI Untuk Bankir Nasional

**Guncangan ekonomi global belum selesai. Di lain sisi, kemajuan teknologi yang makin cepat dan masif telah mendisrupsi banyak sektor. Para bankir diminta untuk waspada dan terus mengasah diri.**

**K**etua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Haryanto T. Budiman, mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang akan dihadapi pelaku industri perbankan di Indonesia. Terlebih di tengah kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian dan kemajuan teknologi yang makin cepat dan masif.

“Misalnya suku bunga acuan yang tinggi di Amerika Serikat (AS). Suku bunga di AS masih belum ada tanda-tanda akan diturunkan dalam waktu dekat karena inflasi di negara tersebut masih cukup tinggi,” ujar Haryanto dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Bankir Indonesia (IBI) 2023 di Graha Niaga, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.

Menurut Haryanto, ekonom di AS masih terpecah pandangannya, apakah AS akan mengalami resesi tahun ini atau tidak, mengingat resiliensi ekonomi di negara tersebut. “Banyak pakar, analis, dan praktisi memprediksi kemungkinan masih ada satu sampai dua kali lagi kenaikan suku bunga di tahun ini. Penurunan suku bunga di AS kemungkinan baru akan terjadi di pertengahan tahun 2024,” ungkap Haryanto.

Sementara itu, pemulihan ekonomi di Tiongkok pascapembukaan *lockdown*, kata Haryanto, tidak sesuai dengan prediksi para ekonom dan analis yang memprediksi akan berlangsung dengan cepat.

Menurut Haryanto, kondisi geopolitik masih mengkhawatirkan. Perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan, ada komplikasi baru dengan adanya konflik internal di Moscow, beberapa minggu lalu. Tantangan lainnya ialah adanya berbagai inovasi di bidang teknologi, termasuk generatif *artificial intelligence (AI)*, yang akan berdampak terhadap bisnis jasa keuangan ke depannya.

“Demikian juga dorongan yang semakin kuat dari *stakeholders* dan investor terkait implementasi *ESG (environmental, social and governance)* yang akan berdampak pada bisnis kita,” katanya.

Di tengah disrupsi yang terjadi, lanjut Haryanto, profesi bankir ke depan akan makin kompleks. Karena itu, para bankir harus terus mengasah diri. Selain wajib memiliki kompetensi di bidang *risk management, sales, marketing*, dan keuangan, para bankir mesti memahami



perkembangan terkini di sektor-sektor lain, seperti teknologi dan *ESG* serta dampaknya terhadap sektor jasa keuangan dan profesi bankir.

### Tim Formatur Terbentuk

Pada RUA IBI 2023 ini, seluruh anggota menyetujui pemilihan Tim Formatur untuk menyusun anggota, badan pengurus, dan badan pengawas IBI periode 2023-2027.

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Agus D. W. Martowardojo, secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur merangkap anggota. Sementara, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Darmawan Junaidi, ditetapkan sebagai anggota Tim Formatur.

Hingga 30 Agustus 2023, Tim Formatur disertai tugas untuk membentuk Badan Pengurus dan Badan Pengawas IBI, dan akan berakhir setelah ditetapkannya pengurus dan pengawas.

Haryanto sendiri digadang-gadang menjadi calon kuat untuk dipilih kembali sebagai Ketua IBI untuk periode 2023-2027. Dia dinilai memiliki peran besar di industri perbankan Tanah Air sehingga tepat untuk kembali memimpin IBI. ■

# Pembiayaan Fleet Operasional Untuk Kendaraan Ramah Lingkungan

**Pengembangan produk pembiayaan *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan merupakan solusi dalam implementasi ESG dan mendukung aktivitas hijau di Indonesia. Harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek risiko dan mitigasinya.**

Oleh Moh. Shofa Akbar

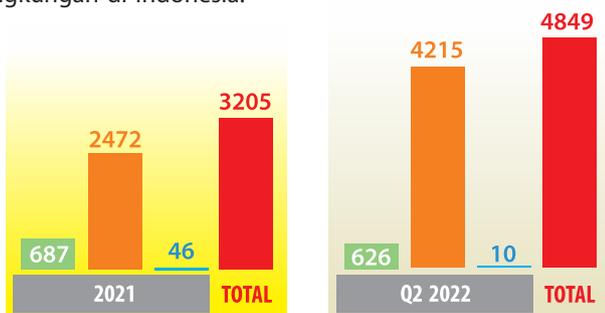


Saat ini, isu atau konsep *enviromental, social, and governance* (ESG) mulai ramai digalakkan oleh hampir seluruh sektor usaha di Tanah Air. Penerapan ESG begitu penting. Menerapkan ESG berarti mendukung ekonomi hijau Indonesia yang berkelanjutan; membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku; memberikan dampak positif bagi perkembangan infrastruktur di Indonesia; dan membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, khususnya di industri perbankan.

Industri perbankan memiliki peran sebagai katalisator untuk mempercepat penerapan aktivitas ekonomi hijau yang berdampak positif terhadap lingkungan dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih tangguh. Dalam upaya mendukung implementasi ESG dan peningkatan bisnis bagi industri perbankan, diperlukan perluasan sektor pembiayaan, khususnya pada kendaraan berwawasan lingkungan.

Kendaraan berwawasan lingkungan menjadi salah satu program yang sangat strategis mengingat dukungan pemerintah pada kendaraan berwawasan lingkungan yang dijadikan sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Tren penjualan kendaraan berwawasan lingkungan pun mengalami peningkatan.

Berikut data penjualan kendaraan berwawasan lingkungan di Indonesia:



Keterangan: ■ Kendaraan Listrik ■ Kendaraan Hybrid

Sumber: Gaikindo, 2022.

Berdasarkan data tersebut, penjualan mobil listrik terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan penjualan di industri mobil, meskipun di Q2 2022 baru sekitar 2,1% dari total penjualan. Maka dari itu, salah satu inovasi dan solusi dalam mendukung implementasi ESG dan akselerasi bisnis aktivitas hijau di industri perbankan yaitu pengembangan produk pembiayaan *fleet* operasional untuk kendaraan berwawasan lingkungan.

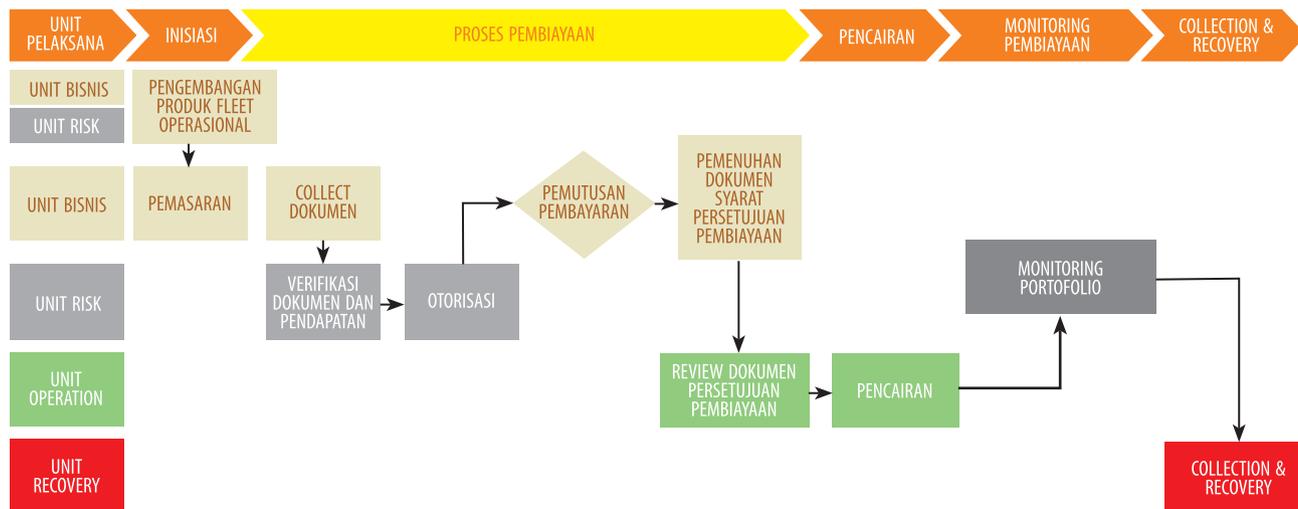
Pengembangan produk tersebut didukung dengan Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Darat. Pengembangan produk pembiayaan *fleet* operasional untuk kendaraan berwawasan lingkungan ini dimulai dengan perencanaan proses bisnis, fitur, dan klasifikasi risiko yang dapat diterima oleh bank.

Tujuan pengembangan produk dan proses bisnis pembiayaan *fleet* operasional untuk kendaraan berwawasan lingkungan adalah mendorong pertumbuhan bisnis industri perbankan dalam pembiayaan di sektor ekonomi hijau dengan pertumbuhan bisnis pembiayaan yang berkualitas.

Dalam menerapkan ESG pada industri perbankan serta melakukan perluasan segmen pembiayaan dan akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan, maka diperlukan suatu pengembangan produk pembiayaan dari proses inisiasi bisnis sampai dengan proses penagihan. Salah satu pengembangan produk pembiayaan yang dikembangkan yaitu produk Pembiayaan *Otomotif Fleet* Operasional Khusus Kendaraan Berwawasan Lingkungan. Penyaluran pembiayaan produk *Oto Fleet Operational* kendaraan berwawasan lingkungan menerapkan prinsip tiga pilar, yaitu Unit Bisnis, Unit Risk, dan Unit Operation. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan tumbuh berkualitas.

Target *market* untuk produk pembiayaan *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama, kementerian, perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan anak BUMN. Kedua, perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dan merupakan

## PROSES BISNIS, TARGET MARKET, KLASIFIKASI RISIKO YANG DAPAT DITERIMA, DAN FITUR PRODUK



### Keterangan:

1. Pengembangan produk pembiayaan fleet operasional kendaraan berwawasan lingkungan dilakukan oleh unit bisnis dan unit risk berkaitan dengan proses bisnis, target market, fitur, dan klasifikasi risiko yang dapat diterima.
2. Pemasaran produk dilakukan oleh unit bisnis, baik menggunakan direct order maupun mobile banking.
3. Pengumpulan dokumen pembiayaan dilakukan oleh unit bisnis (laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan laba tiga tahun terakhir, informasi debitur, dan BI Checking, PPAK Checking, serta dokumen pendapatan nasabah).
4. Verifikasi dokumen dilakukan oleh unit risk terkait ketentuan dokumen yang harus sesuai dengan fitur dan klasifikasi risiko yang dapat diterima oleh bank.
5. Otorisasi pembiayaan dilakukan oleh unit risk. Tujuan dari otorisasi ini yaitu memastikan pembiayaan ini telah sesuai dengan klasifikasi risiko yang dapat diterima oleh bank, sehingga kualitas pembiayaan fleet operasional kendaraan berwawasan lingkungan terjaga dengan baik.
6. Pemutusan pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat bank sesuai dengan limit wewenang pemutus pembiayaan.
7. Unit Bisnis melakukan pemenuhan syarat dan ketentuan persetujuan pembiayaan.
8. Unit Operation melakukan review dokumen pembiayaan sebagai syarat untuk dilakukan pencairan.
9. Unit Operation melakukan pencairan pembiayaan fleet operasional kendaraan berwawasan lingkungan.
10. Unit Risk melakukan monitoring kualitas pembiayaan fleet operasional kendaraan berwawasan lingkungan.
11. Unit Collection & Recovery melakukan penagihan dan recovery atas agunan kendaraan berwawasan lingkungan.

perusahaan kelolaan serta *customer corporate banking*, *commercial banking*, *SME*, dan perusahaan yang dimiliki nasabah prioritas.

Kriteria risiko yang dapat diterima perusahaan yang mengajukan *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan terdiri atas dua aspek. Pertama, aspek manajemen. Aspek ini meliputi lama operasional usaha (minimal lima tahun), pengurus di direksi perusahaan tidak masuk dalam kategori daftar hitam BI atau PPAK, dan kualitas pembiayaan pengurus tergolong lancar dalam tiga bulan terakhir.

Kedua, aspek keuangan. Aspek ini meliputi laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba dalam tiga tahun terakhir dan hasil kualitas pembiayaan perusahaan lancar.

Sementara, untuk mengatasi risiko *after sales* kendaraan berwawasan lingkungan yang masih rendah dan tidak dapat menutupi sisa *outstanding* pembiayaan, mitigasi yang bisa dilakukan antara lain pemasaran produk *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan disesuaikan dengan target *market* yang telah disusun, seperti kementerian, BUMN/BUMD, perusahaan anak BUMN, dan perusahaan korporasi bank yang bergerak di sektor unggulan. Selain itu, perlu penyediaan mekanisme penjaminan dan asuransi khusus untuk kendaraan berwawasan lingkungan.

Sebagai penutup, pengembangan produk pembiayaan *fleet* operasional kendaraan berwawasan lingkungan merupakan solusi dalam implementasi *ESG* dan mendukung aktivitas hijau di Indonesia. Selain itu, dapat memperluas segmen pembiayaan dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis perbankan. Maka dari itu, pengembangan produk ini harus disusun secara komprehensif dan mempertimbangkan aspek risiko serta mitigasinya. ■

Penulis adalah Oto Risk Officer Bank Syariah Indonesia (BSI).

| NO | FITUR   | KETERANGAN  |
|----|---|---|
| 1  | Nama Produk                                     | Pembiayaan Otomotif Fleet Operasional Kendaraan Berwawasan Lingkungan   |
| 2  | Channel Akuisisi                                | Direct order<br>Mobile banking  |
| 3  | Tujuan Penggunaan                               | Pembelian mobil baru, kendaraan berwawasan lingkungan                   |
| 4  | Merek dan Jenis Kendaraan Berwawasan Lingkungan | Sesuai dengan ketentuan internal bank                                   |
| 5  | Jangka Waktu Pembiayaan                         | 5 tahun   |
| 6  | Skema Pembiayaan                                | Jual Beli/Akad Murabahah  |
| 7  | Debt to Service ratio                           | ≤ 10 Juta 40%<br>> 10 Juta 50%  |
| 8  | Minimal Penghasilan                             | > 8 Juta  |
| 9  | Maksimal Unit yang Dibiayai                     | Fleet Operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan |

# Pilih Bank Digital Atau Bank Konven dengan Layanan Digital?

**Kehadiran bank-bank digital sebagai sebuah inovasi transaksi perbankan telah melengkapi pasar perbankan nasional. Apa pertimbangan nasabah ketika memilih layanan bank?**

**N**asabah perbankan kini semakin dimanjakan dengan hadirnya bank digital yang memberikan layanan *full digital*. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik, selain satu kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Dalam perkembangannya, dalam hal ini di Indonesia, sejumlah bank digital telah berhasil menjalankan bisnisnya dengan catatan menggembirakan. Per semester I 2023, misalnya, sejumlah bank digital berhasil meraih profit signifikan. Sebut saja Allo Bank, Hibank, Amar Bank, Bank Jago, Seabank, Bank Raya, dan Blu BCA.

Keberhasilan bank digital dalam menerapkan model bisnis yang berbeda dengan bank konvensional atau konven tak lepas dari berbagai inovasi yang mereka lakukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dengan biaya yang relatif lebih murah. Di lain sisi, sama seperti bank konvensional, bank digital juga tetap dituntut untuk bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis yang *prudent* dan berkesinambungan, manajemen risiko yang memadai, pemenuhan aspek tata kelola seperti memiliki direksi yang berkompetensi, penerapan perlindungan data nasabah, serta kontribusinya bagi pengembangan ekosistem keuangan nasional.

Lalu, apa bedanya bank digital dengan layanan perbankan digital? Mana yang lebih disukai nasabah? Layanan perbankan digital, yang diinisiasi oleh bank konvensional, bila mengacu pada POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Contoh layanan perbankan digital adalah BCA Mobile

Banking. Dengan layanan tersebut, nasabah bisa mendapatkan kemudahan dari beragam layanan daring yang disediakan, kendati tetap perlu datang ke kantor cabang untuk mendapatkan layanan keuangan tertentu.

Bank digital perkembangannya memang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hasil survei perusahaan riset OnePoll, seperti dilansir situs Study Finds, bisa menjadi catatan. OnePoll melakukan survei terhadap 1.800 orang Amerika Serikat (AS) yang memiliki rekening tabungan selama periode 3 Maret sampai dengan 12 April 2023.

Hasil survei menunjukkan, 83% responden mengaku lebih suka menggunakan jasa keuangan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Bahkan, 36% responden hanya mau menggunakan bank konvensional dan meninggalkan digital sepenuhnya, termasuk 40% Gen Z dan 34% *Baby Boomer*. Hanya 10% responden yang menyatakan lebih suka menggunakan jasa bank digital yang tak memiliki layanan fisik.

Survei itu menunjukkan bahwa 60% dari populasi yang disurvei lebih memilih bank konvensional karena lebih yakin transaksinya ditangani dengan benar bila dilayani oleh manusia secara langsung. Sementara, 51% mengatakan bahwa dengan menggunakan layanan bank konvensional, mereka jadi bisa berkomunikasi dengan manusia.

Namun, menurut *Business Development Advisor* Bursa Efek Indonesia (BEI), Poltak Hotradero, layanan fisik seperti kantor cabang yang dimiliki bank konvensional memiliki konsekuensi biaya yang tidak murah. Selain itu, katanya, lembaga perbankan konvensional lebih sukar dalam mengakuisisi nasabahnya saat ini.

"Karena, banyak yang tidak relevan. Kasir, misalnya. Saya mau tanya, teman-teman berapa banyak yang masih ketemu kasir bank saat ini? Jadi, konsep kasir itu sebenarnya tidak relevan. Oleh karenanya, banyak kasir di bank itu yang di-*outsource* sekarang ini, karena bank tahu kalau *maintain talent* itu biayanya mahal," ujar Poltak di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Di satu sisi, menurutnya, bank-bank digital lebih unggul dalam hal efisiensi biaya dan akuisisi nasabah, karena bank digital berkolaborasi dengan ekosistem digital yang ada,

## LABA BANK DIGITAL (Per Juni 2023)

# allobank

RP 216,25  
MILIAR



RP 127,67  
MILIAR



RP 40,51  
MILIAR



RP 9,28  
MILIAR



RP 85,04  
MILIAR



RP 34,81  
MILIAR



RP 4,79  
MILIAR

Sumber: Laporan Keuangan Bank/Diolah

mulai dari *e-commerce, insurance platform, investment platform*, hingga yang lainnya. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Direktur Bank Jago, Sonny Christian Joseph.

"Jadi, bagaimana bank itu bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ada hiburan, transportasi umum, orang mau naik taksi misalnya atau gojek. Lalu, bisa juga buka rekening *Stockbit* yang mana langsung terhubung dengan apps Bank Jago. Kemudian, terkait *FnB*, mau beli *Gofood*, tidak usah *top up* lagi, tinggal bayar pakai Jago Pocket. Kita juga ada kerja sama dengan beberapa mitra dalam penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah. Dengan perusahaan *multifinance, fintech P2P lending*, dan sebagainya," papar Sonny.

Jadi, sebaiknya menggunakan bank digital atau bank konvensional yang memiliki layanan digital?

Piter Abdulah, Direktur Eksekutif Segara Institute, memberikan solusi *wise*. Menurut dia, menggunakan

layanan bank digital atau bank konvensional yang memiliki layanan digital tergantung pada kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Nasabah Gen Z dan Milenial saat ini mungkin sudah familier dengan bank digital. Sementara, Generasi *Baby Boomer* sebagian masih merasa nyaman dengan datang ke kantor cabang bank, dan sebagian lagi mulai terbiasa dengan layanan digital.

Jika merujuk pada hukum pasar, kata Piter, bank digital ke depan tak beda jauh dengan bank konvensional, khususnya dalam hal pilihan nasabah. Bank konvensional yang saat ini berhasil menjadi pemenang adalah bank yang memiliki layanan yang bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya. Demikian juga bank digital.

"Kelak, bank digital yang akan jadi pemenang adalah bank digital yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman," tutupnya. ■

## Bank Digital Naik Bank Konven Masih Favorit

SURVEI Consumer Payment Attitudes Study (CPAS) 2022 Visa di Indonesia menemukan fakta terkait pilihan bank digital dan bank konvensional (bank konven) di masyarakat. Hasil survei menyebutkan, ternyata masyarakat masih lebih banyak menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank digital, yakni sebesar 51%.

Hasil survei mengungkapkan, banyak responden yang masih khawatir dengan penggunaan bank digital. Sebanyak 46% mengaku takut rekeningnya di-*hack*, 39% khawatir akan terjadinya transaksi tidak sah atau penipuan, dan 35% mengkhawatirkan jaringan yang tidak stabil.

"Itu kekhawatiran utama terhadap bank digital. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan literasi bank digital, terutama dari sisi keamanan," ungkap *Head of Products and Solutions* Visa Indonesia, Dessy Masri, saat diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, survei menemukan, penggunaan bank digital di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 75% pada 2020, 86% pada 2021, dan 88% pada 2022. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari kelompok muda yang lebih adaptif dengan teknologi, yakni generasi milenial dan gen Z.

Namun, peningkatan inklusi keuangan tersebut belum seimbang dengan tingkat literasi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%, sementara indeks literasi keuangan masyarakat berada di level 49,68%.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan banyak orang yang memiliki akun bank, tapi tidak paham terhadap produk-produk keuangannya. Ia berpendapat, hal itu bisa berbahaya bagi masyarakat.

"Karena, masyarakat jadi rentan terhadap penipuan. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko tersebut," ujar Huda.

Untuk itu, perlu mendorong upaya meningkatkan literasi keuangan. Dapat dimulai dari sisi pendidikan. Dia merekomendasikan agar literasi keuangan diterapkan dari jenjang sekolah dasar (SD).

"Untuk meningkatkan tingkat literasi, harus dimulai dari pendidikan. Kalau anak SD umumnya cuma mengenal uang dan menabung, tapi harus masuk juga terkait manfaat layanan perbankan, pembayaran menggunakan kartu maupun *handphone*, dan sebagainya. Literasi ini yang harus kita dorong," kata Huda. ■

# PERBANAS & BI Sumbar Bantu Korban Bencana di Padang

**Bencana banjir dan tanah longsor di Kota Padang, Sumatera Barat, menyisakan duka mendalam. PERBANAS dan BI turun tangan memberikan bantuan tanggap darurat.**

Tak ada yang menduga, hujan deras di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu, menimbulkan bencana besar. Tingginya curah hujan di sana sejak Kamis (13/7) malam, disertai pasang air laut, menimbulkan banjir yang memutus akses sejumlah jalan di kawasan Batang Arau dan Bukit Gado-Gado di Kecamatan Padang Selatan.

Tak hanya memutus akses jalan, hujan lebat yang tiada henti sejak Kamis malam itu juga menimbulkan bencana tanah longsor yang menimbun dan merusak sejumlah bangunan publik dan rumah warga. Bahkan, di antara enam rumah warga yang tertimbun tanah longsor, terdapat dua korban jiwa, yakni dua anak balita berusia lima tahun dan tiga tahun.

Bangunan yang mengalami rusak berat antara lain Panti Asuhan Adzikra, yang membuat bangunan tempat anak-anak panti bernaung ini sebagian besar tidak dapat digunakan. Selain itu, Masjid Al Mubarak yang mengalami kerusakan parah pada sarana toilet dan tempat wudu sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Melihat kondisi itu, bankir-bankir di Kota Padang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan tanggap darurat. Mereka yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Perwakilan Provinsi Sumbar langsung berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumbar untuk bersama-sama meringankan penderitaan korban.

“Semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat, tidak hanya untuk pembelian kebutuhan pokok dan kebutuhan urgen lainnya, tapi juga untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat longsor. Sehingga, masyarakat terdampak dapat kembali menempati rumahnya dengan rasa aman,” ujar Faritzs Adam, Ketua Perbanas Sumbar, saat penyerahan bantuan bersama Endang Kurnia Saputra, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar. ■



# Selamat & Sukses

atas diraihnya akreditasi

## MAGISTER MANAJEMEN PERBANAS INSTITUTE

dengan predikat

# UNGGUL

No. 571/DE/A.5/AR.10/VIII/2023

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI  
MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

